

Skripsi

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

SUPARDI

Nomor Induk Mahasiswa : 105640225515



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PENGESAHAN

Judul : Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bana
Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Supardi

Nomor Stambuk : 105640225515

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I


Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II


Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

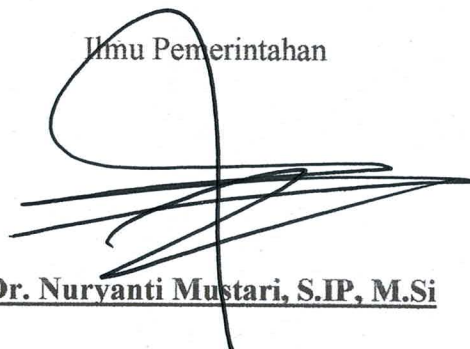
Fisip Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM (Ketua)

2. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Supardi

Nomor Stambuk : 1056 4022 5515

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu gelar akademik.

Makassar, 16 Agustus 2019



Supardi

ABSTRAK

SUPARDI. 2019, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dan untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yaitu studi kasus . sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yaitu, dalam Aspek Menyatu, BUMDes ini telah menyatukan beberapa instansi atau komponen seperti pemerintah (pemerintah desa Bana), swasta (pedagang) dan masyarakat (petani dan peternak). Pemerintah Desa Bana sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pengelolaan maupun penjualan hasil produk, swasta sebagai membeli produk dan masyarakat petani dan masyarakat peternak sebagai penyedia bahan mentah yang akan di kelolah oleh BUMDes. Kedua, Menyeluruh seperti rekrutmen pengelola BUMDes yang diprioritaskan minimal berpendidikan SMU/Sederajat atau orang yang dianggap mampu dan memiliki keahlian dibidang tersebut serta sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan hasil bumi sampai pada proses pemasaran produk dan yang ketiga, Integral yaitu strategi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. walaupun ada beberapa faktor pendukung seperti sarana dan prasarana namun ada pula faktor penghambat yaitu lokasi yang sulit dijangkau, infrastruktur jalan dan masyarakat petani itu sendiri.

Kata Kunci : *Strategi, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemberdayaan Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul **“ Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”** dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isi, untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pengelolaan data maupun tahap penulisan data. Namun dengan kesadaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materil maupun moril, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan yang baik ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT karena dengan berkat nikmat dan izinnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW berkat beliau kita bisa terlepas dari masa kebodohan kemasa yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini.
2. Kedua orang tua saya ibu tercinta Monro dan ayah saya Iskandar D yang telah melahirkan, membesarkan, mencurahkan kasih sayang dan pengorbanannya sehingga saya bisa seperti ini.
3. Bapak Drs. Alimudin Said, M.Pd selaku pembimbing I yang telah mendidik, membantu dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.ip.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi (S1)
7. Bapak dan Ibu Dinas Sosial Kabupaten Bone, dan Segenap Staf , Kepala Desa Bana, Pengelola BUMDes serta Seluruh Masyarakat Desa Bana. Atas seluruh kerja sama dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

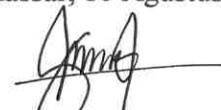
8. Seluruh keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Saudara Se-Perjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, SOSPOL INSTITUTE, HIMJIP, HUMANIERA, HUMANIKOM, dan KEPMI BONE DPC BONTOCANI.
9. Terima kasih untuk teman-teman KKP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018.

Selain itu, Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah melakukan banyak kesalahan dan kekhilafan. Baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki untuk pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua ini adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa.

Akhirnya, Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga ini dapat bernilai ibadah disisi-Nya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Makassar, 16 Agustus 2019


Supardi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Penerimaan Tim	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi	8
B. Konsep BUMDes	13
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	20
D. Kerangka Pikir	24
E. Fokus Penelitian.....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis data	31
G. Pengabsahan data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	33
2. Gambaran Umum Kecamatan Bontocani.....	39
3. Gambaran Umum Desa Bana.....	40
4. Profil BUMDes Desa Bana	44
B. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.....	47
1. Menyatu <i>Unifed</i>	48
2. Menyeluruh <i>Comprehensif</i>	52
3. Integral <i>Integrated</i>	57
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone..	60
1. Faktor Pendukung	61
2. Faktor Penghambat.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Informan Penelitian	30
1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone	38
1.3 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan I Kecamatan Bontocani.....	39
1.4 Jumlah Dusun/ Lingkungan Menurut Desa /Kelurahan di Kecamatan Bontocani	40
1.5 Nama-nama Dari Tanah “Ade”	41
1.6 Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Bana ...	42
1.7 Struktur Organisasi BUMDes Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	47



DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Kerangka Pikir	25
1.2	Peta Wilayah Kabupaten Bone	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes

bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78 yaitu “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan lembaga BUMDes dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Dengan demikian, bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Sehubungan dengan itu,

maka untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial budaya masyarakat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk di kelolah menjadi kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian di implementasikan dengan Peraturan Desa Bana No 6 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes.

Tujuan BUMDes Dasa Bana sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat Desa
2. Meningkatkan perekonomian Desa
3. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
4. Melepas ketergantungan usaha ekonomi mikro terhadap rentenir di pedesaan
5. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
6. Membuka lapangan kerja
7. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pihak ketiga

8. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum wargan
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
10. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bana yang diberi nama BUMDes Sipakarennu yang merupakan salah satu badan usaha yang memiliki tiga unit usaha yaitu :

1. Unit Usaha pengolahan hasil pertanian dalam hal ini pengolahan kopi
2. Unit usaha pengolahan hasil ternak madu
3. Unit usaha pengembangan ternak sapi

Desa Bana merupakan salah satu desa di Kecamatan Bontocani dengan luas wilayah 69,16 Kilo Meter Persegi dengan jumlah penduduk dengan jumlah 2.267 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 33 jiwa / kilometer persegi. Desa dengan jumlah Penduduk terbanyak di Kecamatan Bontocani dengan geografi yang di dominasi oleh pegunungan dengan iklim yang sangat mendukung terhadap pertanian di Desa Bana. Kopi dan madu menjadi salah satu potensi yang ada di Desa Bana. Kondisi iklim yang mendukung membuat kopi di Desa Bana tumbuh subur sehingga Desa Bana menjadi salah satu desa penghasil kopi terbesar di Kabupaten Bone dengan cita rasa yang berbeda dengan kopi yang ada di daerah lain di Sulawesi Selatan.

Selain kopi, madu hutan juga menjadi potensi Desa Bana yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Kabupaten Bone sehingga hal itu menjadi potensi

desa yang harus di manfaatkan secara maksimal oleh perangkat desa dan elemen desa demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Desa Bana. Potensi tersebut saat ini diupayakan pengembangannya melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang saat ini digerakkan untuk mengolah produk unggulan yang ada di Desa Bana.

BUMDes Sipakarennu Desa Bana merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Bone dengan menjadikan kopi sebagai salah satu produk unggulan yaitu kopi Robusta, Arabika dan Excelsa. Ketiga jenis kopi tersebut memiliki cita rasa tersendiri. Selain kopi juga ada madu Trigona dan Dorsata (Madu Hutan) yang dikemas dengan teknologi terkini. Potensi pertanian yang ada di Kecamatan Bontocani khususnya di Desa Bana yang besar menjadi peluang untuk pengembangan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada.

Walaupun banyak potensi sumber daya alam di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone serta adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun seiring berjalannya waktu BUMDes ini belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat Desa Bana karena adanya beberapa kendala seperti infrastruktur jalan, sumber daya manusia kemudian wilayah pemasaran produk BUMDes yang masih terbatas di luar wilayah Kabupaten Bone.

Sehingga kehadiran BUMDes ini setidaknya mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan

pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama *cooperatif*, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong *steam engine* dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone?
2. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan, referensi kajian serta menambah wawasan pengetahuan dan sebagai pembanding pada penelitian lainnya terkhusus mengenai strategi pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber pemikiran dan informasi serta membuka cakrawala berfikir masyarakat luas mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai "*art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam perangan. Secara umum strategi adalah cara untuk mencapai kemenangan atau untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke berbagai bidang kehidupan.

Definisi dari strategi adalah garis arah atau cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berikut ini adalah penjabaran dan uraian dari definisi strategi menurut Husain Umar (2001).

- a. Strategi adalah garis arahan atau cara bertindak. Disini dapat diuraikan bahwa strategi adalah arah dan cara yang ditetapkan dalam memberikan garis kerja atau tindakan dari pelaku yang ditunjuk atau diberitugas.
- b. Strategi adalah sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagian dari kita mungkin sudah tahu bahwa sebagian besar kegiatan atau bahkan semua kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak atau bagian yang berkompeten.
- c. Strategi adalah dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena dalam tindakan mencapai tujuan, kekuatan dan kelemahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Karena

dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki akan lebih mudah mengoptimalkannya, sebaliknya jika kita mengenal kelemahan kita akan bisa menghindari atau bahkan berusaha menciptakan kekuatan dari kelemahan tersebut.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Mulyana (dalam Umar, 2001) menjelaskan ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan sumberdaya, lingkungan dan tujuan. Rumusan strategi paling tidak memberikan informasi apa yang akan dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasikan, berapa besar biaya dan berapa lama waktu pelaksanaan, hasil apa yang akan di peroleh.

Argyris Rangkuty (2009) strategi merupakan respon secara terus menerus maupun aktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat merugikan organisasi. Menurut Suwarsono (2012) mengatakan strategi pengembangan dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas dan sumberdaya yang pada akhirnya akan melahirkan postur organisasi yang berbeda dimasa depan.

Vansil Salusu (2003) Menyatakan strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu, tentang :

- a. Sasaran jangka panjang dari organisasinya
- b. Kebijakan dan kendala
- c. Seperangkat rencana yang berjalan mengenai tujuan jangka pendek.

Strategi menurut Kuncoro (2004) strategi berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Ide bahwa strategi “menetapkan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya” menyatakan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif dalam polasasaran, dan kebijakan atau rencana umum untuk meraih tujuan yang ditetapkan, dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

John A Pearce II dan Richard B. Robinson jr (2003), “*Strategic, management, formulation, implementation and control*”, Irwin Mc Grawhil, Mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Pada organisasi sektor publik menekankan pada pentingnya proses perumusan strategi terdiri dari delapan langkah interaktif yaitu perjanjian awal diantara pembuatan keputusan, identifikasi mandat yang dihadapi organisasi pemerintah, klasifikasi misi dan nilai organisasi,

identifikasi peluang eksternal dan ancaman yang dihadapi organisasi, identifikasi kekuatan internal dan kelemahan organisasi, identifikasi isustrategis, pengembangan strategi, dan gambaran organisasi di masa mendatang.

Menurut Suwarsono 2000, strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan baik yaitu tujuan organisasi atau perusahaan, maka strategi memiliki beberapa sifat Antara lain :

- a. Menyatu (*unifed*) : yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan
- b. Menyeluruh (*comprehensive*) : yaitu mencakup seluruh aspek dalam suatu organisasi atau perusahaan
- c. integral (*integrated*) : yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business and functional*)

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan *Planning* dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan, Onong Uchjana (2003). Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta yang menunjuk arah jalan saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik oprasionalnya. Menurut Bluech dan Juench (dalam Saladin, 2000) definisi Strategi ialah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Gluek Rochaeti (2005) strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi

organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemua yaitu dalam rangka menjamin agar tujuan organisasi tercapai. Menurut Thompson dalam Oliver (2007) strategi adalah sebuah cara untuk mencapai hasil akhir ,yang menyangkut tujuan dan sasaran organisasi sedangkan menurut Bennet dalam Oliver (2007) Strategi merupakan arah yang di pilih orang untuk diikuti dalam pencapaian misinya.

Menurut Rangkuti (2009) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing .Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Untuk memahami konsep perencanaan strategis, kita perlu memahami pengertian konsep mengenai strategi .Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.

Amstrong (2003) mendefenisikan strategi setidaknya terdapat tiga pengertian pertama , strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefenisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan sungguh-sungguh alokasi sumberdaya instansi yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, dimana perspektif dimana isu krisis atau factor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi.

Ketiga, strategi pada dasarnya adalah penetapan tujuan (tujuan strategis) dan menalokasikan atau menyesuaikan sumberdaya dengan peluang (strategis berbasis sumberdaya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis dan basis sumber dayanya.

B. Konsep BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan kawasan pedesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu wujud dalam hal pembangunan dan pemberdayaan dikawasan pedesaan, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada hakikatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan.

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes, yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BUMDes sebagai penopang ekonomi dari penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya memberikan dampak bagi masyarakat desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDes, 2007:5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan Sustainable, (Buku panduan BUMDes, 2007:12). BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan Masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain

pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDes adalah:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
 - a. Dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
 - b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
 - c. Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturanperundangan-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 78
 - a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensiDesa
 - b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 79

- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa
 - b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 80
- a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 81
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum

- b) Kepengurusan
- c) Hak dan kewajiban
- d) Permodalan
- e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga
- g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

Dalam buku panduan BUMDes (2007 :5), ada empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian aslidesa
2. Meningkatkan pendapatan aslidesa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
 - d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesa
 - e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa
- Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes (PKDSP FE UB, 2007:11) yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama *kooperatif*, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong *steam engine* dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Sekilas, makna pemberdayaan memiliki makna luas dari beberapa kesalahan. Agar dapat memahami secara mendalam tentang definisi

pemberdayaan, maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu proses pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu pelanggan mendapatkan kekuatan, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri pelanggan tersebut, termasuk mengurangi masalah pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama-sama diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka dan juga pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan dapat disingkat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupan. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport,2004). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, etal., 2002).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 2005).

b. Hakekat Pemberdayaan Masyarakat

Sumber-sumber daya manusia memang peranan sangat penting dalam proses pembangunan pertanian tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang lain. Pembangunan pertanian tidak lepas dari andil masyarakat tani yang lebih banyak berdomisili di daerah perdesaan, dimana sektor pertanian menjadi penopang utama kehidupan dan penghidup bagi mereka. Permasalahan yang sangat mendasar di perdesaan kaitanya dengan ketidakberdayaan masyarakat

tani itu sendiri baik dari segi kebersamaan, peran terhadap sumber daya dan kekuatan terhadap keahlian.

Priyono (2000 : 34) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar- menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Sehubungan dengan pengertian ini, Sumodiningrat (2007: 22) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan Sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan isegala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar dari historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

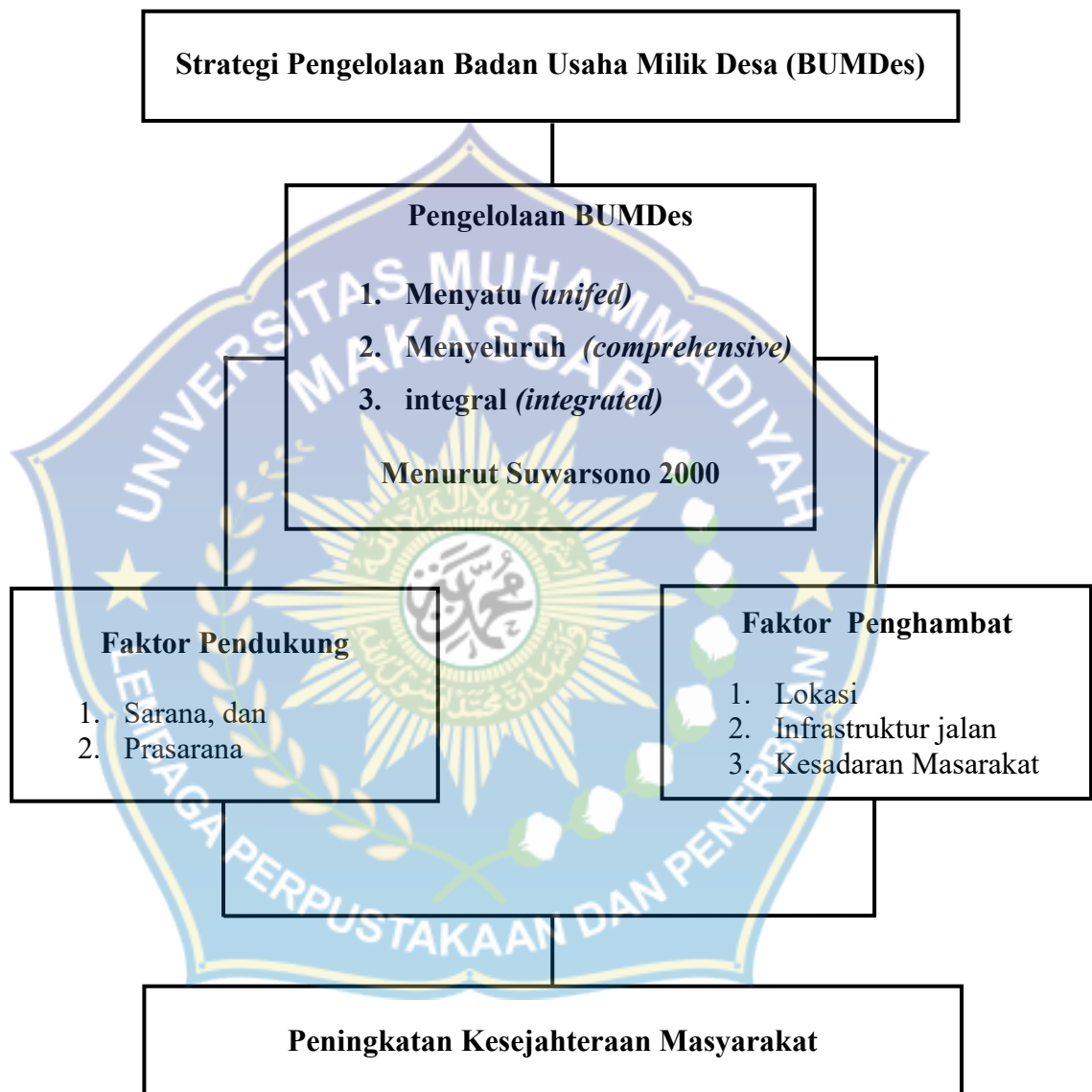
Prijono Dan Pranarka (2000) membagi dua fase penting untuk memahami akar konsep pemberdayaan, yaitu: *pertama*, lahirnya Eropa modern sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru yang dikenal sebagai *Aufklärung* atau *Enlightenment*, dan *kedua*, lahirnya aliran-aliran pemikiran eksistensialisme, fenomenologi, personalisme yang lebih dekat dengan gelombang Neo- Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan sebagainya.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan suatu asumsi bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlalu banyak di terapkan disetiap desa dan dalam pengelolaanya belum terlalu maksimal karena berbagai faktor baik pembentukan disetiap desa peralatan maupun pemetaan potensi yang akan dikelola sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan kerangka fikir dibawah ini :

Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Fikir



E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan tersebut. Sehingga dapat ditemukan solusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana, melalui strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta untuk pemecahan masalah perekonomian dan agar program ini dapat menjadi solusi yang solutif atas permasalahan perekonomian di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah di uraikan sebelumnya. Jelas bahwa pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini diutamakan data badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Deskripsi fokus penelitian ini adalah masyarakat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu di Desa Bana.

Berdasarkan pendeskripsian fokus penelitian terkait strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat :

1. Perlu strategi pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bana melalui program yang ada di BUMDes Sipakarennu Desa Bana

2. Pengelolaan badan usaha milik desa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa terutama dalam aspek perekonomian agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pada penelitian ini kami mencoba untuk meneliti faktor pendorong dan hambatan- hambatan pada yang muncul pada pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupatn Bone.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini sementara waktu direncanakan kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Lokasi ini penulis pilih karna adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bana Kecamatan Bontocani yang memiliki potensi terhadap pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna *perspektif subyek* lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian an sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan observasi dan wawancara dengan informan tentang strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari Kantor setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kami.

D. Informan Penelitian

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam *in depth interview* dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara di lokasi penelitian dan dalam melakukan wawancara para informan penulis menggunakan buku catatan dan perekam suara sebagai alat bantu.

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Ishak, S.Pd	IH	Kepala Desa Bana	1
2	Supriadi	SP	Pengawas BUMDes	1
3	Saleng	SL	Kordinator BUMDes	1
4	Musliadi	MS	Pengelola BUMDes	1
5	Sutarni	ST	Pengelola BUMDes	1
6	Jumadi	JM	Petani Kopi	1
7	Jerre'	JR	Toko Masyarakat	1
8	Suing	SI	Peternak Madu	1
9	Muhammad	MH	Peternak Sapi	1
10	Asri	AS	Toko Masyarakat	1
Total Informan				10

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* dalam bentuk reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus serta pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan penalaran sistematis. Kemudian peneliti menginterpretasikan menjadi seperangkat informasi yang menjabarkan mengenai Strategi pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaann masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan

kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain pada keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidaktepatannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

a. Geografis

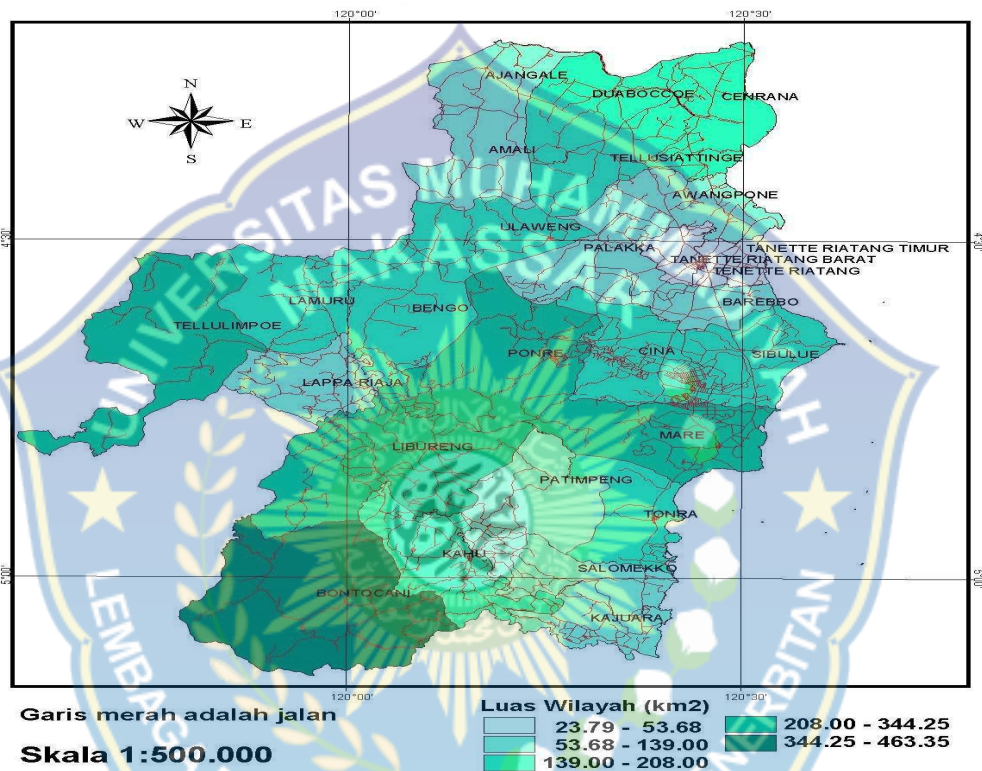
Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang.

Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Gambar 1.2 : Peta Wilayah Kabupaten Bone



b. Ketinggian Tempat

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- 1) Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
- 2) Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- 3) Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
- 4) Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)

5) Ketinggian 750 meter keatas seluas 40.080 Ha (13,76%)

6) Ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52%)

7) Kemiringan Lereng

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kemiringan lereng 0-2 % (datar) : 164.602 Ha (36,1 %)

2) Kemiringan lereng 0-15 % (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 Ha (20,07 %)

3) Kemiringan lereng 15-40 % (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65 %)

4) Kemiringan lereng >40 % (curam) : 12.399 Ha (24,65%)

c. Kedalaman Tanah dan Jenis Tanah

Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu :

1) 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44 %)

2) 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50 %)

3) 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76 %)

4) Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30 %)

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Gleyhumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6 % dari total wilayah, kemudian Renzina 9,59 % dan Litosol 9 %. Penyebaran jenis tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut : sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

d. Iklim

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 26°C – 30°C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.

Dilihat dari potensi sumber daya air permukaan, beberapa sungai di Kabupaten Bone, berpotensi untuk penggunaan bendung/pengairan untuk irigasi persawahan. Upaya untuk memelihara keseimbangan dan ketersediaan sumberdaya air di wilayah Kabupaten Bone, maka perlunya dilakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air baku, termasuk sistem perresapan air pada daerah hulu, melalui cara evapotranspirasi, pengisian air tanah (*ground water*) dan debit air yang mengalir sebagai run off (*surface and subsurface*).

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Bone dicirikan oleh banyaknya sungai, baik yang langsung bermuara ke laut, maupun bermuara di Danau Tempe di Kabupaten Wajo (Sungai Walane) dan sungai-sungai besar lainnya. Pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya air di Kabupaten Bone diarahkan

untuk menjaga kesinambungan sumber - sumber air baku yang ada. Sempadan sungai di sekitar sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Bone seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang harus dijaga kelestariannya dengan cara mempertahankan fungsi lindung hutan, yang ada di wilayah tersebut. Sebagian besar sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bone bermuara pada pesisir pantai Timur Kabupaten Bone, sedangkan hulu DASnya berada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, Maros dan Soppeng. Untuk itu perlunya menjalin kerjasama dengan kabupaten lain disekitarnya untuk mengelolah sumberdaya air tersebut.

e. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bone tercatat 4.559 km² dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 328 Desa dan 44 Kelurahan, dimana Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 463,35 km² (10,16%) dan 344,24 km² (7,55%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan ibukota kabupaten dan Kecamatan tanete Riattang dengan luas masing-masing adalah 23,79 km² (0,52 %) dan 48,88 km² (1,07%).

Tabel 1.2 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone

Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
Bontocani	463,35	10,16
Kahu	189,50	4,16
Kajuara	124,13	2,72
Salomekko	84,91	1,86
Tonra	200,32	4,39
Patimpeng	130,47	2,86
Libureng	344,25	7,55
Mare	263,50	5,78
Sibulue	155,80	3,42
Cina	147,50	3,24
Barebbo	114,20	2,50
Ponre	293,00	6,43
Lappariaja	138,00	3,03
Lamuru	208,00	4,56
Tellu Limpoe	318,10	6,98
Bengo	164,00	3,60
Ulaweng	161,67	3,55
Palakka	115,32	2,53
Awangpone	110,70	2,43
Tellu Siattinge	159,30	3,49
Amali	119,13	2,61
Ajangale	139,00	3,05
Dua Boccoe	144,90	3,18
Cenrana	143,60	3,15
Tanete Riattang Barat	53,68	1,18
Tanete Riattang	23,79	0,52
Tanete Riattang Timur	48,88	1,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

2. Gambaran Umum Kecamatan Bontocani

Bontocani adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia Kecamatan Bontocani merupakan kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Bone yang memiliki luas wilayah 463,35 km². Kecamatan Bontocani merupakan wilayah dataran tinggi dengan geografi yang di dominasi oleh pegunungan dengan iklim yang mendukung terhadap pertanian.

Kecamatan Bontocani terdapat 10 Desa dan 1 kelurahan yang terdiri dari 41 Dusun, dimana Desa Bana dan Desa Bontojai merupakan 2 Desa yang memiliki jumlah Dusun terbanyak dengan masing-masing memiliki 6 Dusun. Sedangkan wilayah Desa dengan jumlah Dusun terkecil adalah Desa Lamoncong yang hanya memiliki 2 Dusun.

Tabel 1.3 : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontocan

Desa/Kelurahan	Luas km ²	Persentase
Watang Cani	50,53	10,91
Pattukku	30,24	6,53
Bonto Jai	51,25	11,06
Bulu Sirua	42,19	9,11
Bana	69,16	14,93
Pammusureng	32,30	6,97
Kahu	34,26	7,39
Langi	59,20	12,78
Ere Cinnong	35,04	7,56
Lamoncong	29,42	6,35
Mattiro Walie	29,76	6,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Tabel 1.4 :Jumlah Dusun/Lingkungan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontocani

Desa/Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RW	RT
Watang Cani	4	-	6	16
Pattukku	3	-	7	12
Bonto Jai	6	-	6	12
Bulu Sirua	4	-	6	8
Bana	6	-	8	14
Pammusureng	5	-	8	13
Kahu	-	4	6	16
Langi	5	-	4	16
Ere Cinnong	3	-	6	12
Lamoncong	2	-	4	4
Mattiro Walie	3	-	4	6
Bontocani	41	4	69	129

Sumber : Kantor Kecamatan Bontocani

3. Gambaran Umum Desa Bana

a. Legenda Dan Sejarah Pembangunan Desa

Menurut cerita daerah Bana pada awalnya di huni oleh satu keluarga yang mempunyai 12 orang anak. Kemudian ke 12 anak itu mempunyai keluarga dan dibagi menjadi 12 bagian wilayah yang disebut “Lari Tanah” sesuai dengan wilayah yang diberikan kedua belas anak itu untuk menjadi hak masing-masing untuk menguasai hal-hal didalamnya.

Adapun nama-nama Lari Tanah “ADE” sesuai julukan ke 12 bersaudara itu adalah :

Tabel 1.5 : Nama-Nama Lari Tana “Ade”

1	Fuatta	7	Segeri
2	Tengnga	8	Safosuji
3	Genre	9	Sullehatangnge
4	Saharu	10	Kapala
5	Anakarungnge	11	Guru Kampong
6	Kajuara	12	Sanro Hanua

Sumber : Kantor Desa Bana Kecamatan Bontocani

Kemudian pada waktu karena keadaan masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka mencari makanan di hutan diluar tempat Lari Tananya. Tak terduga salah seorang penduduk melihat seorang laki-laki di hutan kemudian melapor kepada ketua Adat. Setelah itu ketua adat menemui orang tersebut dan ditanyakan asal-usulnya. Dari hasil pembicaraan terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone (Wijanna Mangkau'E di Bone/Salassae). Kemudian ketua adat pergi ke kerajaan Bone untuk menghadap tentang kebenaran pernyataan dan *stambuk* yang dibawa laki-laki tersebut .

Ternyata keterangan yang disampaikan Ketua Adat kepada Raja Bone diiyakan dengan berkata “BA NA” artinya betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone tapi, karena pernah membuat pelanggaran sehingga dihukum dengan diasingkan. Dan ternyata sampai kedaerah ketua adat tersebut. Selanjutnya ketua adat meminta kepada agar laki-laki itu diangkat menjadi Raja/Arung kemudian diiyakan oleh raja Bone dengan kata Ba Na yang artinya *ia betul* . Sekembalinya dari menghadap Raja Bone, ketua adat tersebut

menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut dan kemudian diangkat menjadi Raja Bana.

Dari cerita diatas dari jawaban Raja Bone “BA NA” digabungkan menjadi BANA dan sampai sekarang menjadi nama sebuah dusun dan nama Desa. Desa Bana pada awal terbentuknya menjadi desa hanya menjadi 3 dusun yaitu Bana, Oro dan Paku. Tapi karena begitu luasnya daerah Bana sehingga dusun Paku dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu Cippaga dan Pao, Dusun Bana di mekarkan menjadi 2 dusun yaitu Dusun Bana Tengah dan Dusun Bana Jauh. Sehingga sampai Desa Bana menjadi 6 dusun. Berikut ini diuraikan nama Kepala desa Bana.

Tabel 1.6 : Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Bana

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1962-1963	A.Lanti Nyonri	Penunjukan
2	1963-1964	A.Guntur	Penunjukan
3	1964-2003	A.Muin Baso	Penunjukan/Pemilihan
4	2003-2009	M.Amir.P	Pemilihan
5	2009-2015	M.Amir,P	Pemilihan
6	2015-Sekarang	Ishak S.Pd	Pemilihan

Sumber : Kantor Desa Bana Kecamatan Bontocani

b. Geografis

Desa Bana merupakan salah satu dari 11 Desa di Wilayah Kecamatan Bontocani yang terletak 6 Km ke arah Utara Dari Kecamatan Bontocani. Desa

Bana mempunyai luas wilayah seluas $\pm 6916M^2$ dengan batas batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulusirua
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kahu dan Desa Pammusureng
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

c. Iklim

Desa Bana, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bana Kecamatan Bontocani.

d. Jumlah penduduk

Desa Bana merupakan salah satu desa di Kecamatan Bontocani dengan luas wilayah 69,16 Kilo Meter Persegi dengan jumlah penduduk dengan jumlah 2.615 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 33 jiwa / kilometer persegi. Desa Bana merupakan Desa dengan jumlah Penduduk terbanyak di Kecamatan Bontocani, kemudian desan bana ini merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bontocani yang memiliki geografi yang di dominasi oleh pegunungan dengan iklim yang sangat mendukung terhadap pertanian di Desa Bana . Masyarakat Desa Bana memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara bertani dan berpernak. Kopi dan madu menjadi salah satu potensi yang ada di Desa Bana. Kondisi iklim yang mendukung membuat kopi di Desa Bana tumbuh subur sehingga Desa Bana menjadi salah satu desa penghasil kopi terbesar di

Kabupaten Bone dengan cita rasa yang berbeda dengan kopi yang ada di daerah lain di Sulawesi Selatan.

4. Profil BUMDes Sipakarennu Desa Bana

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu Desa Bana

Pemerintah Desa Bana mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Bana (BUMDes) Sipakarennu. BUMDes di Desa Bana berkedudukan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Daerah kerja BUMDes Bana berada di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dan jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu di Desa Bana dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah desa
- b. Pemerintah Kabupaten
- c. Pemerintah Provinsi
- d. Penyertaan modal masyarakat desa
- e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUMDes.

2. Jenis Usaha yang dikelola BUMDes sipakarennu Desa Bana

Adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDes sipakarennu Desa Bana yaitu :

- a. Unit Usaha pengolahan hasil pertanian dalam hal ini pengolahan kopi
- b. Unit usaha pengolahan hasil ternak madu
- c. Unit usaha pengembangan ternak sapi

BUMDes Sipakarennu Desa Bana merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Bone dengan menjadikan kopi sebagai salah satu produk unggulan yaitu kopi Robusta, Arabika dan Excelsa. Ketiga jenis kopi tersebut memiliki cita rasa tersendiri. Selain kopi juga ada madu Trigona dan Dorsata (Madu Hutan) yang dikemas dengan teknologi terkini. Potensi pertanian yang ada di Kecamatan Bontocani khususnya di Desa Bana yang besar menjadi peluang untuk pengembangan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada.

3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes sipakarennu

- a. Maksud pendirian BUMDes adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bana melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, peternakan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
- b. Tujuan BUM Desa Bana yaitu :
 - 1) meningkatkan Perekonomian Desa;
 - 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensiDesa;
 - 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa
 - 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - 6) membuka lapangan kerja;

- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
 - 8) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
4. Penghasilan BUMDes Sipakarennu Desa Bana

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dapat meraih keuntungan kurang lebih 15 juta pertahunnya atau sekitar 1,2 juta perbulan. Adapun tata cara pembagian keuntungan yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir s/d 31 Desember tahun berjalan.
- b. Hasil Usaha adalah Seluruh Pendapatan Dikurangi Pengeluaran.
- c. Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan asli Desa (PADes) sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
 - 2) Kelembagaan max sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
 - 3) Dana cadangan sebanyak 10 % (sepuluh persen);
 - 4) dana sosial sebanyak 10 % (sepuluh persen); dan
 - 5) tambahan modal min 20 % (Dua puluh persen).

5. Struktur BUMDes sipakarennu Desa Bana

Tabel 1.7 : Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Sipakarennu Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam BUMDes
1.	Saleng	Ketua BPD	Komisaris BUMDes
2.	Supriadi	PLT. Sekretaris Desa	Pengawas
3.	Musliadi	Masyarakat	Direktur
4.	Sutarni	Masyarakat	Sekretaris
5.	Ernawati	Masyarakat	Bendahara
6.	Erna	Masyarakat	Dagang (Trading)
7.	Ilham	Masyarakat	Bisnis Sosial (Social Busines)
8.	Makmur	Masyarakat	Usaha Perantara (Bokering)

Sumber : AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu Desa Bana

B. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu

melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Kehadiran BUMDes di setidaknya mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama *cooperatif*, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorongan *steam engine* dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Agar Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terealisasi dengan baik maka perlu adanya beberapa sifat yaitu pertama, menyatu (*unived*), menyeluruh (*comprehensife*) dan integral (*integrated*).

1. Menyatu (*unifed*)

Menyatu (*unifed*) : yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan, dalam hal ini suatu kebijakan harus mampu menyatukan suatu bagian dalam organisasi sehingga strategi tersebut dapat berjalan secara efektif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang ada dipedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa, Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, baik itu keterlibatan dari pihak swasta, masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya Badan Usaha Milik Desa BUMDes

mebutuhkan beberapa mitra agar dalam pelaksanaan program ini dapat mencapai tujuannya dengan sebaik mungkin. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bermitra dengan pihak-pihak yang membidangi sektor pemerintahan, sektor swasta dan sektor lainnya.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bana diberi nama BUMDes Sipakarennu. Ada 3 unit usaha yang dimiliki BUMDes sipakarennu ini yaitu unit usaha Kopi, Madu dan Ternak Sapi, dimana BUMDes itu sendiri adalah program yang dilaksanakan berdasarkan dukungan dari berbagai elemen baik dari pihak pemerintah itu sendiri, pihak swasta maupun dukungan dari pihak masyarakat, dengan dukungan dari berbagai pihak maka di harapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu Desa Bana ini dapat terlaksana dengan baik”. (hasil wawancara penulis dengan IH pada tanggal 17 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu program pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat.

Wawancara dengan koordinator BUMDes Sipakarennu Desa Bana yang mengatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu Desa Bana adalah satu-satunya BUMDes di Kabupaten Bone yang mengelolah Kopi, saya selaku Koordinator berharap dengan adanya BUMDes sipakarennu ini dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat utamanya para petani Kopi di Desa Bana itu sendiri”. (hasil wawancara penulis dengan SL pada tanggal 19 Juni 2019)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sipakarennu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat petani kopi terkhusus di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Kemudian di tambahkan oleh pengelola BUMDes sipakarennu yang mengatakan bahwa :

”BUMDes ini dapat memberikan keringanan bagi masyarakat petani kopi karna masyarakat tidak lagi membawa hasil panen mereka ke pasar untuk di jual karna kami dari pengelolah BUMDes sipakarennu ini akan terjun langsung untuk membeli hasil panen maupun hasil ternak di rumah masyarakat”. (hasil wawancara dengan MS pada tanggal 19 Juni 2019)

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes Sipakarennu Desa Bana ini masyarakat sangat terbantu karna mereka tidak lagi kepasar untuk memasarkan hasil panen mereka.

Wawancara dengan pengawas BUMDes yang mengatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa sipakarennu hadir dengan menjadikan kopi sebagai produk unggulan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat petani kopi. Dengan hadirnya BUMDes Desa Bana diharapkan dapat menyatukan berbagai instansi seperti pemerintah, swasta dan masyarakat”. Hasil wawancara penulis dengan SP pada tanggal 19 Juni 2019

Hasil wawancara diatas penulis apat menarik kesimpulan bahwa hadirnya BUMDes ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemudian diharapkan kerjasama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Wawancara dengan masyarakat Petani Kopi yang mengatakan bahwa :

“Kehadiran BUMDes ini memberikan manfaat bagi kami sebagai petani kopi karna hasil panen kami di beli langsung di rumah oleh pengelolah BUMDes sehingga kami sebagai masyarakat petani kopi tidak perlu lagi mengantarkan hasil panen kepasar yang jaraknya cukup jauh”. (hasil wawancara dengan JM pada 20 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sipakarennu ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat petani karna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menjual hasil panennya.

Wawancara dengan pengelola BUMDes Sipakarennu yang mengatakan bahwa:

”Selain Kopi, BUMDes sipakarennu Desa Bana juga mengelolah Madu dan ternak sapi, dengan ini dari pengelola berharap dapat membantu para petani dan peternak khususnya masyarakat Desa Bana itu sendiri”. (hasil wawancara penulis dengan IL pada tanggal 20 Juni 2019)

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes sipakarennu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat petani dan masyarakat peternak sapi maupun peternak madu.

Senada dengan hasil wawancara dari petani kopi, masyarakat peternak madu mengatakan bahwa :

’Kehadira BUMDes ini bisa memberikan kami kemudahan dalam penjualan hasil ternak kami karna sebelum adanya BUMDes di Desa Bana ini kami sebagai peternak madu terkendala dalam penjualan hasil panen kami, dikarenakan madu trigona ini belum banyak dibudidayakan sebelum adanya BUMDes di Desa Bana”. (hasil wawancara penulis dengan ST tanggal 20 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karna dapat memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil panen masyarakat peternak madu.

Wawancara dengan masyarakat mengatakan Bahwa :

“BUMDes di Desa Bana ini memberikan kontribusi yang baik bagi kami sebagai masyarakat petani kopi namun belum merata karna sampai hari ini masih ada masyarakat di Desa Bana khususnya di Dusun Pao ini yang belum mempunyai kebun kopi, sedangkan unit usaha yang dikelola BUMDes dari sektor pertanian itu hanya kopi, ”. (hasil wawancara dengan JR pada tanggal 21 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa :

BUMDes Sipakarennu Desa Bana memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat akan tetapi belum secara maksimal di karenakan masih banyak

masyarakat petani yang belum menanam kopi sedangkan yang menjadi salah satu produk yang di kelola oleh BUMDes sipakarennu adalah kopi.

2. Menyeluruh (*Komprehensif*)

Menyeluruh (*comprehensive*) : yaitu mencakup seluruh aspek dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan sebuah program tidak terlepas dari yang namanya proses pelaksanaan. Banyak orang yang tidak memperhatikan nilai dari sebuah proses atau hanya memperhatikan hasil. Proses yang dilakukan oleh pengelola BUMDes sipakarennu Desa Bana harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, proses yang baik dan komprehensif tentunya akan menghasilkan capaian tujuan BUMDes yang efektif untuk memberayakan masyarakat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bana yang mengatakan bahwa :

”Syarat untuk menjadi pengurus BUMDes yaitu, pertama ; berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun, kedua ; warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat karena BUMDes adalah lembaga usaha maka jiwa wira usaha menjadi syarat penting,dan ketiga ; berpendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat, syarat ini berlaku untuk para pengurus BUMDes tetapi pada bagian yang menyangkut pada pelaksanaan proses usaha BUMDes ini bisa mempekerjakan orang yang dianggap mampu dan tidak harus lulusan minimal SMU/sederajat,”. (hasil wawancara dengan IH pada tanggal 17 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa : Tidak semua orang bisa menjadi pengurus BUMDes dan menjadi pengelola disana, tentunya harus melewati berbagai syarat yang telah tentukan. Pelaksanaan operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, tetapi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya, perangkat desa tidak boleh menjadi pengurus BUMDes dikarenakan sangat terbuka

kemungkinan bermain kepentingan jika perangkat desa ada dalam kepengurusan di BUMDes tersebut.

Selanjutnya, wawancara dengan koordinator BUMDes sipakarennu Desa Bana yang mengatakan bahwa :

“Untuk menjadi bagian daripada pengelola BUMDes kami harus melewati berbagai syarat, selain itu kami sebagai pengelola juga harus berkepribadian baik, jujur, dan harus kompak antar sesama pengelola dan juga bisa memberikan perhatian terhadap BUMDes ini, karna dalam menjalankan kegiatan ini kejujuranlah yang menjadi indikator pertama”. (hasil wawancara penulis dengan SL pada tanggal 19 Juni 2019)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan program ini tentu sebagai pengelola ataupun pengurus harus memiliki pribadi yang positif demi kelancaran pengelolaan BUMDes tersebut. Pengelola BUMDes juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, kemudian dalam menjalankan program ini indikator yang harus diutamakan adalah kejujuran dan kekompakan antar sesama pengelola.

Adapun wawancara dengan pengelola BUMDes sipakarennu Desa Bana yang mengatakan Bahwa:

“Pengelolaan BUMDes sipakarennu Desa Bana, kami dari pengelola harus memperhatikan hasil tani yang akan kami kelolah, contoh misalnya kopi, karna masih banyak petani kopi yang melakukan panen namun belum memasuki masa panen hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap kualitas dari produk kopi yang kami kelolah”. (hasil wawancara penulis dengan MS pada tanggal 20 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Bana harus melalui tahapan sebelum di olah, sesuai engan yang disampaikan oleh pengelola diatas bahwa sebelum melakukan pengolahan harus di perhatikan terlebih dahulu dan kemudian di pisahkan antara kopi yang masih mentah dengan kopi yang betul-betul

sudah siap panen, dengan harapan produk yang dihasilkan oleh BUMDes sipakarennu memiliki kualitas dan citarasa tersendiri.

Hal ini di benarkan oleh pengelola BUMDes yang lain, yang mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan pengolahan kopi kami terlebih dahulu memisahkan antara kopi yang sudah matang dengan yang belum, karna tidak semua kopi yang kami beli dari petani memiliki kualitas yang maksimal, dikarenakan masih banyak petani kopi di desa Bana ini yang masih terganggu oleh hama (monyek). Begitu juga dengan madu, untuk menjaga kualitas yang produk yang di hasilkan, pengelola juga harus memilih hasil panen dari peternak madu dan kemudian dipisahkan madu yang sudah tua dengan madu yang masih muda. Jadi itu yang mengharuskan kami sebagai pengelola untuk memilah terlebih dahulu demi menjaga kualitas produk yg dikelolah BUMDes sipakarennu di Desa Bana”. (wawancara penulis dengan ST 22 Juni 2019)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Untuk menjaga kualitas dari produk yang dikelolah oleh BUMDes sipakarennu di Desa Bana harus dilakukan pemisahan biji kopi terlebih dahulu karna tidak semua hasil panen dari petani memiliki kualitas yang sama, begitu juga dengan peternak madu. Dengan emikian pengelola BUMDes harus memisahkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengolahan untuk menjaga kualitas yang dihasilkan oleh BUMDes sipakarennu Desa Bana.

Adapun wawancara dengan masyarakat petani kopi yang mengatakan bahwa :

“Salah satu yang menjadi kendala kami sebagai petani kopi yaitu kami masih kekurangan lahan untuk kami jadikan sebagai lahan pertanian kopi, adapun masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang masih kosong namun terkendala karna belum memiliki bibit kopi. dari pihak BUMDes itu sendiri belum ada bibit yang disediakan untuk masyarakat petani”. (wawancara penulis dengan pada tanggal JM 23 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa : BUMDes sipakarennu Desa Bana tidak memberikan atau belum memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan bibit kopi untuk masyarakat petani. Dengan ini masyarakat terbilang masih mandiri dalam hal bertani kopi.

Kemudian wawancara dengan masyarakat petani mengatakan bahwa :

”BUMDes memang memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat petani kopi maupun masyarakat yang beternak madu ataupun masyarakat yang beternak sapi, namun kehadiran BUMDes ini boleh dikata belum begitu maksimal dalam memberayakan masyarakat petani secara keseluruhan karna hanya petani kopi yang merasakan dampak dari kehadiran BUMDes sipakarennu ini”.(hasil wawancara penulis dengan JR pada tanggal 23 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa : Kehadiran BUMDes sipakarennu Desa Bana belum memberikan kontribusi secara menyeluruh karna produk yang dikelola BUMDes sipakarennu hanya mengarah pada petani kopi dan peternak madu maupun peternak sapi.

Wawancara dengan masyarakat peternak madu yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai peternak madu merasakan dampak yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa itu, dengan adanya BUMDes sipakarennu ini saya merasa lebih mudah untuk menjual hasil panen saya, saya lihat bukan hanya saya yang merasakan dampak positif yang diberikan BUMDes ini tapi juga dirasakan masyarakat peternak lainnya dan juga banyak masyarakat yang tertarik untuk beternak madu trigona ini, selain terbilang mudah di budidayakan madu trigona juga bisa di manfaatkan sebagai obat sehari-hari dan juga bisa menambah perekonomian masyarakat dan kemudian pemasarannya pun terbilang muda dengan adanya BUMDes sipakarennu ini”. (hasil wawancara dengan SI pada tanggal 23 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : Kehadiran BUMDes sipakarennu di Desa Bana dengan menjadikan madu sebagai produk unggulan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat peternak madu

dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bana khususnya masyarakat yang membudidayakan madu.

Wawancara dengan masyarakat peternak sapi yang mengatakan bahwa :

”BUMDes sipakarennu yang menjadikan sapi sebagai salah satu produk unggulan, dengan ini saya sebagai masyarakat biasa yang sebelumnya tidak mampu membeli sapi untuk di jadikan ternak karena perekonomian kami terbilang minim namun dengan adanya BUMDes sipakarennu ini masyarakat bisa berternak sapi dari BUMDes dan kemudian hasil penjualan dari ternak tersebut di bagi duan dengan pengelolah BUMDes dan masyarakat peternak”.(hasil wawancara dengan MH pada tanggal 24 Juni 2019)

Menurut wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa :

BUMDes sipakarennu Desa Bana sangat membantu masyarakat dalam hal peternakan sapi karena memberikan peluang bagi msyarakat yang sebelumnya kurang mampu untuk beternak.

Kemudian ditambahkan oleh masyarakat lainnya yang mengatakan bahwa:

”Menurut saya kehadiran BUMDes di Desa Bana dengan mengelolah kopi, madu dan ternak sapi memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Bana terkhusus bagi masyarakat petani kopi dan peternak sapi, namun sampai hari ini belum bisa memberikan kontribusi secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Bana karena yang merasakan dampak dari Badan Usaha Milik Desa ini hanya petani kopi dan sebagian dari peternak, peternak sapi pun belum menyeluruh karena sapi yang dimiliki oleh BUMDes sipakarennu masih terbatas, kalau tidak salah sapi yang dimiliki BUMDes kurang lebih 30 ekor, sedangkan jumlah penduduk Desa Bana yang kurang mampu masih terbilang banyak dari jumlah sapi yang di kelolah oleh BUMDes sipakaennu ini ”. (hasil wawancara penulis dengan AS pada tanggal 23 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes sipakarennu dapat memberikan dampak positif bagi msyarakat karena bisa memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu untuk beternak sapi akan tetapi

belum bisa memberikan kontribusi secara menyeluruh karena sapi yang dikelola BUMDes sipakarenni Desa Bana masih terbilang minim dibanding dengan masyarakat Desa bDna yang membutuhkan ternak sapi tersebut.

Selain perternak sapi, masyarakat petani kopi juga merasakan dampak positif dari BUMDes sipakarenni Desa Bana ini, akan tetapi juga belum bisa memberikan dampak secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Bana.

3. Integral (*Integrated*)

integral (*integrated*) : yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business and functional*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat.

Lebih jelas lagi wawancara dengan kepala Desa Bana yang mengatakan bahwa:

”Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang ada di Desa Bana, Badan Usaha Milik Desa di Desa Bana ini diberi nama BUMDes Sipakarennu. BUMDes sipakarennu berdiri sejak tahun 2015 tujuan di Bentuknya BUMDes sipakaennu ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kemudian dapat memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Desa Bana itu sendiri”. (hasil wawancara penulis dengan IH pada tanggal 17 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bana yang diberi nama BUMDes sipakarennu. Program pemerintah ini dikembangkan oleh pemerintah Desa sejak

tahun 2015, pemerintah Desa Bana berharap dengan berdirinya BUMDes sipakarennu dapat meningkatkan perekonomian desa .

Wawancara dengan koordinator BUMDes sipakaennu Desa Bana yang mengatakan bahwa:

“Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat Berasal dari pemerinta Desa itu sendiri, tabungan masyarakat, Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, pinjama, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan”. (hasil wawancara penulis dengan SL 19 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Modal yang di gunakan oleh BUMDes dapat diperoleh dari berbagai instasi baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta.

Wawancara dengan pengawas BUMDes yang mengatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa sipakarennu hadir dengan menjadikan kopi sebagai produk unggulan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat petani kopi. Dengan hadirnya BUM Desa Bana diharapkan dapat menyatukan berbagai instansi seperti pemerintah, swasta dan masyarakat”. Hasil wawancara penulis dengan SP pada tanggal 19 Juni 2019

Hasil wawancara diatas penulis apat menarik kesimpulan bahwa hadirna BUMDes ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemudian diharapkan kerjasama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Adapun wawancara dengan pengelola BUMDes sipakarennu Desa Bana yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Bana yang sebelumnya tidak bertani kopi karena penjualan hasil panen masih terbilang murah dan susah untuk di pasarkan akan tetapi dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini, saya lihat bahwa masyarakat yang dulunya tidak tertarik untuk bertani kopi namun sekarang berlomba-lomba untuk menanam kopi, itu semua karena BUMDes hadir dengan menjadikan kopi sebagai produk unggulan, ini dapat memberikan

kemudahan bagi masyarakat dalam hal pemasaran hasil taninya”.(wawancara dengan MK pada tanggal 20 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa:

BUMDes sipakarennu dengan menjadikan kopi sebagai produk unggulan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk bertani kopi dan kemudian memberikan kemudahan bagi petani kopi dalam hal memasarkan hasil taninya.

Pernyataan diatas diperkuat oleh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Hadirnya BUMDes di Desa Bana sangat membantu kami sebagai masyarakat petani karna memberikan kami dorongan untuk bertani kopi, banyak juga masyarakat yang sebelumnya tidak tertarik untuk bertani kopi karena pemasaran kopi di Desa Bana ini masih terbilang susah sebelum adanya BUMDes sipakarennu ini namun karna BUMDes sipakarennu mengelolah kopi jadi kami tidak terkendala lagi dalam pemasaran hasil panen kami”. (hasil wawancara penulis dengan JR pada tanggal 23 Juni 2019)

Mengenai wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Dengan adanya BUMDes sipakarennu ini memberikan dampak positif bagi masyarakat petani di Desa Bana disamping memberikan dorongan masyarakat untuk bertani kopi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat petani dalam hal pemasaran hasil panennya.

Wawancara dengan masyarakat peternak yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat peternak madu seperti saya ini sangat terbantu karena memberikan kami peluang untuk terus membudayakan madu trigona, selain memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan madu trigona juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena harga dari madu trigona ini terbilang mahal di banding dengan madu hutan.”. (hasil wawancara penulis dengan MD tanggal 23 Juni 2019)

Menurut wawancara penulis dengan masyarakat peternak diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes ini membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berternak madu trigona.

Kemudian ditambahkan oleh peternak madu lainnya yang mengatakan bahwa :

“Hadirnya BUMDes di Desa Bana dengan menjadikan madu sebagai salah satu produk ini memberikan kami kemudahan untuk menjual madu kami, selain itu diharapkan dapat dapat meningkatkan perekonomian Desa”. (hasil wawancara dengan AL tanggal 23 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa selain memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan, Madu Trigona juga juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat peternak madu di Desa Bana, disamping itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Wawancara dengan masyarakat peternak sapi yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai salah satu masyarakat peternak sapi dari BUMDes sipakarenu dengan berternak sapi dari BUMDes, saya dan pengelola BUMDes bagi hasil, umpanyanya sapi yang saya ternak terjual dengan 10 juta misalnya saya dapat separu dari hasil penjualan itu dan separuhnya lagi untuk BUMDes. Ini sangat membantu saya sebagai masyarakat yang kurang mampu karena dulunya saya tidak bisa beli sapi untuk dternak tapi karna BUMDes memberikan saya sapi untuk saya ternak dengan ini saya sangat terbantu”. (hasil wawancara penulis dengan ED pada tanggal 24 Juni 2019)

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat peternak sapi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : dengan menjadikan sapi sebagai salah satu unit usah dalam BUMDes sipakarenu Desa Bana memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sapi untuk dternak, dengan ini masyarakat bisa berternak sapi yang dimiliki BUMDes dengan syarat bagi hasil.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Faktor yang mempengaruhi Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani

Kabupaten Bone adalah faktor pendukung dan faktor penghambat strategi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana yaitu sebagai Berikut:

1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu Sarana dan Prasarana. Dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu memerlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang utama untuk terlaksananya sebuah program dengan baik.

Wawancara dengan kepala Desa Bana yang mengatakan bahwa:

“Ada tempat yang telah disediakan untuk dijadikan khusus sebagai tempat pengelolaan Unit Usaha yang dikelola oleh BUMDes sipakarennu, lokasinya berada di dusun oro samping kediaman saya sendiri karena di sekitaran kantor desa tidak ada lagi lahan yang kosong jadi kami ambil tempat disana. Adapun anggaran yang kami gunakan untuk membeli fasilitas untuk BUMDes sipakarennu sekitar 100 juta, dana ini sebagian diperoleh dari Dana Desa”. (wawancara dengan IH pada tanggal 17 Juni 2019)

Hasi wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Dalam pengelolaan BUMDes sipakarennu Desa Bana telah disediakan tempat oleh pemerintah Desa Bana itu sendiri. Kemudian pemerintah Desa Bana juga telah menyediakan fasilitas untuk digunakan dalam mengelola unit Usaha BUMDes sipakarennu Desa Bana.

Senada dengan yang dikatakan oleh koordinator pengelola BUMDes yang mengatakan bahwa :

”Pengelolaan BUMDes telah disediakan tempat dan alat seperti mesin untuk mengelola kopi, untuk alat pengelola kopi di sini sudah lengkap mulai dari penyangrai kopi hingga pengemasan”. (hasil wawancara penulis dengan SL pada tanggal 19 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, alat yang diperlukan untuk mengelola unit usaha telah memadai dengan ini produk yang di kelolah oleh BUMDes sipakaennu sudah siap untuk di pasarkan.

Selanjutnya wawancara dengan pengelola BUMDes yang mengatakan bahwa:

“Sejak tahun 2015 BUMDes sipakarennu ini terbentuk di Desa Bana, sejak tahun itulah kami ditugaskan sebagai pengelola. Kami diberikan perlengkapan untuk membantu proses pengelolaan BUMDes, seperti alat penyangrai sampai pengemas kopi, peyaring madu dan diberikan modal untuk membeli sapi”. (wawancara dengan penulis dengan ST pada tanggal 22 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu diberikan pasilitas berupa alat pengolah kopi, penyaring madu dan modal untuk membeli ternak berupa sapi, fasilitas tersebut diberikan kepada pengelola BUMDes sejak tahun 2015.

Kemudian pengelola lain mengatakan bahwa :

“Untuk perlengkapan yang digunakan sebagai alat pengolah unit usaha BUMDes sipakarennu ini telah diseiakan oleh pemerintah, jadi untuk alat yang digunakan sebagai pengolah kopi itu sudah lengkap mulai dari pengeringan hingga pengemasan, dan kemudian alat untuk pengolah madu trigona juga telah disiapkan. Jadi pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk kami gunakan dalam mengelolah produk BUMDes sipakaennu.”. (hasil wawancara penulis dengan IL pada tanggal 20 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Pemerintah Desa Bana telah menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan untuk mengelolah unit usaha yang di kelolah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana.

2. Faktor Penghambat

Dalam hal ini dapat juga digambarkan faktor penghambat yang mempengaruhi Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah lokasi yang sulit di jangkau, infrastruktur jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat petani terhadap kualitas dari hasil pertanian mereka.

Adapun wawancara dengan kepala Desa Bana yang mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor penghambat yaitu lokasi yang terpencil sehingga jarak antara lokasi BUMDes dengan konsumen cukup jauh kemudian infrastruktur jalan menuju Desa Bana ini juga kurang mendukung sehingga untuk pemasaran hasil produk BUMDes sipakarennu sedikit terhambat”. (wawancara dengan IH pada tanggal 17 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penjualan hasil dari produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana adalah jarak antar kosumen yang cukup jauh kemudian infrastruktur jalan menuju Desa Bana juga kurang mendukung.

Wawancara diatas tidak jauh beda dengan yang dikatakan oleh kordinator BUMDes sipakarennu yang mengatakan bahwa :

“Faktor penghambatnya yaitu lokasi Desa Bana ini cukup jauh dari konsumen sehingga untuk penjualan produk dari BUMDes kami sedikit terhambat. kami juga bekerjasama dengan beberapa warkop yang ada di Kota Kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari lokasi BUMDes ini”. (hasil wawancara penulis dengan SL pada tanggal 19 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jarak antara kota Kabupaten dengan lokasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siapakarennu Desa Bana cukup jauh jadi penjualan hasil produk BUMDes sipakarennu sehingga terkendala karena lokasinya cukup jauh dari konsumen.

Wawancara dengan pengelola BUMDes sipakarennu yang mengatakan

Bahwa:

“Pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu yang menjadi hambatan kami yaitu hasil panen dari petani kopi karena tidak sedikit petani kopi yang melakukan panen sebelum masa panen itu sendiri sehingga ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari produk kami”. (hasil wawancara penulis dengan MS pada tanggal 19 Juni 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masih banyak petani kopi yang kurang menyadari bahwa hasil panen sangat berpengaruh terhadap hasil produk kopi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana.

Pengelola lain membenarkan hal itu, pengelola tersebut mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi penghambat dalam proses pengolahan kopi yaitu karena masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan hasil panen mereka, biar yang belum matang di panen ini juga jadi ini menyulitkan kami karena kami harus memisahkan terlebih dahulu antara yang matang dengan yang mentah karena kalau dicampur ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk kami”. (hasil wawancara penulis dengan MK pada tanggal 20 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa, kesadaran masyarakat terhadap kualitas dari hasil panen mereka sangat berpengaruh terhadap produk kopi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana sehingga pengelola harus memisahkan terlebih dahulu antara kopi yang sudah matang dengan yang belum demi menjaga produk yang dihasilkan oleh BUMDes sipakarennu Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam Aspek Menyatu, BUMDes ini telah menyatukan beberapa instansi atau komponen seperti pemerintah (pemerintah desa Bana), swasta (pedagang) dan masyarakat (petani dan peternak). Pemerintah Desa Bana sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pengelolaan maupun penjualan hasil produk, swasta sebagai pembeli produk dan kemudian masyarakat petani dan masyarakat peternak sebagai penyedia bahan mentah yang akan di kelolah oleh BUMDes sipakarennu.
2. Aspek Komprehensif mulai dari rekrutmen pengelola BUMDes yang diprioritaskan minimal berpendidikan SMU/Sederajat atau orang yang dianggap mampu dan memiliki keahlian dibidang tersebut serta sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan hasil bumi sampai pada proses pemasaran produk.

3. Aspek Integral, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya masyarakat sangat sulit untuk memasarkan hasil pertaniannya dengan kehadiran BUMDes ini masyarakat sudah lebih mudah memasarkan hasil pertaniannya karena pengelola BUMDes yang akan membeli hasil pertanian mereka.
4. Dalam pelaksanaan Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang telah disediakan. Walaupun ada beberapa faktor penghambat seperti kondisi infrastruktur jalan serta lokasi BUMDes sipakarennu yang memiliki jarak cukup jauh.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kordinator BUMDes Sipakarennu, agar menambah jumlah pengelola BUMDes sipakarennu Desa Bana itu sendiri.
2. Hendaknya Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat
3. Sebaiknya Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu memperluas jaringan untuk pemasaran produk dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone itu sendiri.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bone serta Dinas terkait agar memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes untuk pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakarennu di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

5. Disarankan kepada pemerintah agar memperbaiki infrastruktur jalan demi kelancaran untuk pemasaran Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sipakarennu di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Eka Kurniawan, 2016. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*
- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta.*
- Amstrong, 2003. *Manajemen Imbalan : Strategi dan Praktik Remmarasi*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Argyris Rangkuti, 2009: *Bussines Plan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmat. 2004. *Konsep Pemberdayaan*. Bandung: PT.Eresco.
- Hadi, A. P. (2010). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. Yayasan Agribisnis / Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).*
- Ife. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pembangunan.
- Onong Unchana. 2003 . *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Oliver Sandra, 2007. *Strategik Public Relation*, Jakarta : Erlangga.
- Payne.2007. *Hakekat Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarmita W.J.S. 2002. *IPS dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Priyono. 2000. *Pembelajaran dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta Erlangga.
- Rio Haloman, 2017. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rukan Hulu Tahun 2012-2014*. *Jurna Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 4 No.1 – Februari 2017*.
- Robiatul Adawiyah, 2018. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 6 No. 3 September – Desember 2018*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 213 Ayat 1-3*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2009. *Mix Strategi dalam Meningkatkan Volume Penjualan*, Jakarta : PT. Gramedia Utama.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang - Undang No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Robinson, 1994. *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pembangunan.
- Republik Indonesi, 2007, *Undang - Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Public*. Jakarta : Erlangga.

Saladin, Djaslim, 2003. *Manajemen Pemasaran*, Bandung : Linda Karya.

Sumodiningrat. 2007. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*.

Suwarsono, Muhammad. 2000. *Manajemen Strategi. Konsep dan Kasus*. Yogyakarta

YKPN

Umar, Husain, 2003. *Menganalisis Manajemen Strategik*, Jakarta : PT. Garamedia Pustaka Utama.

Vansil , Salusu, 2003 : *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama William, Gluech dan Junch, 2000. *Manajemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan*, Jakarta : Erlangga.







Nomor : 1179 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Supardi
Stambuk : 105640225515
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
Judul Skripsi : ***"Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Mei 2019

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16898/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1694/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 25 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SUPARDI**
Nomor Pokok : 105640225515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juni s/d 01 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.632/VI/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **SUPARDI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640225515
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Pao Desa Bana Kec. Bontocani
Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

" STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE "

Lamanya Penelitian : 11 Juni 2019 s/d 11 Agustus 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



11 Juni 2019

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.

RIWAYAT PENULIS



Peneliti dengan nama lengkap **Supardi** dilahirkan di Ceppaga Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone pada Hari Rabu 13 November 1996 dari pasangan suami Istri Bapak Iskandar dan Ibu Monro. Peneliti adalah anak ke tiga dari empat bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Jalan Sukaria 4, Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 12/79 Bana pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bontocani dan tamat pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kahu dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Insya Allah pada tahun 2019 ini akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone**”